

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN BEasiswa BIDIKMISI
DI POLITEKNIK NEGERI MANADO

Johannes Kristoffel Santie

yymbmanado@gmail.com

Politeknik Negeri Manado

Agus Wahono

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study aims to discuss the implementation of Bidikmisi scholarship assistance policy in Manado State Polytechnic. Theories and definitions relating to public policy initiate the review process undertaken by the author after looking into issues related to the implementation process of the Bidikmisi scholarship assistance. The research was conducted in Manado State Polytechnic by considering the implementation process of Bidikmisi scholarship aid from 2010 until 2016. The research data was obtained through observation, interview, and literature study. The respondents are Director, Vice Director of Academic Affairs, Deputy Director of Student Affairs and some administrative staffs as well as some Bidikmisi scholarship students. The data is then analyzed and described to know how the implementation process of Bidikmisi scholarship assistance policy takes place in Manado State Polytechnic. The result of the research shows that the implementation of Bidikmisi scholarship program policy in Manado State Polytechnic from 2010 until now is conducted based on the program guideline

Keywords: *scholarship, implementation, public policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan bantuan beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado. Teori-teori dan definisi-definisi berkaitan dengan kebijakan publik mengawali proses kajian yang dilakukan oleh penulis setelah melihat permasalahan yang berhubungan dengan proses implementasi bantuan beasiswa Bidikmisi. Penelitian dilaksanakan di Politeknik Negeri Manado dengan memperhatikan proses implementasi bantuan beasiswa Bidikmisi dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Para responden adalah Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan staf administrasi serta mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Data kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk diketahui bagaimana proses implementasi kebijakan bantuan beasiswa Bidikmisi terjadi di Politeknik Negeri Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program bantuan beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado dari tahun 2010 sampai saat ini dilaksanakan berdasarkan pedoman program Bidikmisi dari Dikti. Dalam pelaksanaan kebijakan ditemukan faktor-faktor yang mendukung dan juga yang menghambat.

Kata kunci: beasiswa, implementasi, kebijakan publik

PENDAHULUAN

Setiap negara terutama negara-negara berkembang berusaha untuk dapat bersaing dalam perkembangan dunia. Dalam persaingan tersebut sangatlah dibutuhkan sumberdaya manusia yang memadai. Pemberdayaan sumber daya manusia akan sangat membantu setiap negara untuk bersaing secara global. Di sisi lain negara-negara berkembang memiliki masyarakat yang secara ekonomi dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu atau juga masyarakat yang miskin.

Masyarakat dan bangsa Indonesia sungguh mendapat jaminan untuk bisa mendapatkan pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Proses pendidikan di Indonesia semuanya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah bahkan yang paling utama yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semuanya adalah bentuk kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peningkatan pemerataan akses ke perguruan tinggi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan merupakan calon mahasiswa yang potensial tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena berasal dari

keluarga kurang mampu. Selain itu peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang cerdas dan kurang mampu serta memfasilitasi dan atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional pemerintah masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah.

Dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pendidikan dinyatakan juga tentang dana ataupun pembiayaan pendidikan tersebut. Kita bisa melihat salah satu yaitu dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 ditetapkan (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik, (2) pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan (Sairin, 2014 : 92).

Dewasa ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah sungguh semakin dirasakan oleh masyarakat. Contoh untuk pendidikan dasar bahkan pendidikan menengah pertama pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan yaitu dengan program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Khusus untuk pendidikan tinggi pemerintah mengeluarkan Program Bidikmisi. Program-program tersebut semuanya berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, dan saat ini dijabarkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah.

Program Bidikmisi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan diterapkan sejak tahun 2010 merupakan satu kebijakan dalam bidang pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki tingkat intelektual yang baik dan ingin meningkatkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi program Bidikmisi adalah merupakan satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga untuk mengatasi kemiskinan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan masyarakat Indonesia mampu juga memutuskan mata rantai kemiskinan. Politeknik Negeri Manado adalah perguruan tinggi negeri yang ditunjuk untuk dapat menjalankan program Bidikmisi sejak program ini dikeluarkan yaitu sejak tahun 2010.

Penelitian implementasi kebijakan program bantuan beasiswa Bidikmisi sebagai studi kasus di Politeknik Negeri Manado dengan melihat berbagai hal yang berkaitan dengan proses implementasi sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Berdasar uraian di atas penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program bantuan beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado, (2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manfaat Bantuan Bidikmisi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Manado.

TINJAUAN TEORETIS

Implementasi

Lester dan Stewart dalam Winarno (2016:134) menyatakan, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) atau sebagai suatu dampak (*outcome*)".

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016: 134-135) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Merilee S. Grindle dalam Winarno (2016:135) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Grindle dalam Novianto (2014: 12) memberikan pendapat bahwa "implementasi memiliki tugas "... to establish a link that allows the goods of public policies to be realized as outcomes of government activity." Dapat dikatakan implementasi merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan.

Pendapat dari Pressman dan Wildavsky dalam Novianto (2014:12) menyatakan implementasi adalah *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sementara menurut Gordon dalam Posolong dalam Mulyadi (2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dengan demikian implementasi adalah proses untuk melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Jadi implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Walaupun pemerintah membuat kebijakan yang baik, tetapi kalau tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan itu tidak berguna atau tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kehidupan negara.

Huntington dalam Mulyadi (2015:24) mengatakan perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, cabinet atau presiden negara itu.

Kebijakan

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut *policy*. Kata kebijakan atau *policy* memiliki banyak pengertian menurut beberapa ahli sesuai dengan bidang keahlian mereka. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) selain digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau

keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design* (Winarno, 2016:18).

Pengertian kebijakan (*policy*) yang digunakan dalam praktik sehari-hari untuk menggantikan kegiatan atau keputusan menunjuk perilaku seorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Biasanya juga hanya dapat digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan yang biasa tetapi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis.

Dalam buku *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Ealau dan Prewit memberikan arti kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (Suharto, 2008:17). E. Hugh Heclo memberikan definisi yang sederhana, kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya James E, Anderson menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah. Dengan demikian kebijakan adalah sebuah ketetapan atau konsep yang menjadi pedoman dan dasar yang taktis dan strategis seseorang atau suatu organisasi melakukan suatu tindakan dengan sengaja untuk memecahkan masalah atau mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* banyak terdapat dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda (Winarno, 2016:19). Robert Eystone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai

'hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya' (Winarno, 2016:19).

Winarno mengutip juga definisi dari Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan ini pun tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Dye masih mengatakan dalam bukunya berjudul *What Government Do, Why They Do It, What Difference It Makes*, bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut? (Winarno 2016: 19).

Pendapat Dye tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Heidenheimer, *et. al.* dalam Winarno (2016: 20) bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang 'bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi' dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Indiahono, 2016:17)

Dengan mengomparasikan berbagai definisi, Amir Santoso menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.

Pandangan kedua yaitu para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Mereka yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-

keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga domain, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky. Mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Masing-masing definisi di atas cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Kebijakan publik yang merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta (Winarno, 2016: 22-23)

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima

mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Kebijakan publik sebagai suatu keputusan memiliki tujuan yang jelas seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2015:37). "Kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu".

Dalam peraturan tertulis, tingkat kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat direvisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, kebijakan publik adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislative dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislative, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif berkerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. *Ketiga*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP),

Keputusan/Peraturan	Presiden,
Keputusan/Peraturan	Menteri,
Keputusan/Peraturan	Gubernur,
Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.	

Semua kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahap di mana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2016:31-32). Lester dan Stewart dalam Winarno (2016:134) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Selanjutnya dikatakan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Dikatakan pula bahwa implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan

mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang public dan keputusan yudisial.

Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno 2016:134-135)

Merilee S. Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Grindle, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik -pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran dan sarana- diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian berbagai program bisa dikembangkan untuk merespons tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa

dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola dengan tujuan untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno 2016:135).

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Jadi ada tahapan lain sebelum masuk pada tahap implementasi itu sendiri. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan, kondisi dan situasi.

Van Meter dan Van Horn kemudian memberikan perbedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Dari pendapat-pendapat para ahli yang dikemukakan tersebut kita bisa melihat betapa rumitnya implementasi kebijakan publik tersebut. Kalau dilihat dan dipikirkan dari arti kata implementasi itu sendiri yang bermakna "pelaksanaan" sepintas dapat dikatakan bahwa implementasi itu sangat mudah, namun dalam pelaksanaan proses tersebut sangat rumit.

Ada 9 Model Implementasi Kebijakan Publik dari para ahli kebijakan publik yang terkenal menurut Mulyadi (Mulyadi, 2015 : 66-84): (1) Model Merilee S. Grindle; (2) Model George C. Edward III; (3) Model Mazmanian dan Sabatier; (4) Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn; (5) Model Hogwood dan Gunn; (6) Model Goggin, Bowman, dan Letter; (7) Model Elmore, dkk; (8) Model Nakamura & Smallwood; (9) Model Jaringan.

Beasiswa Bidikmisi

Program bantuan beasiswa Bidikmisi adalah salah satu kebijakan dalam mengatasi kemiskinan. "Program ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara elegan, sehingga dimasukkan sebagai program kerja 100 hari dalam Kabinet Indonesia Bersatu II" (Pedoman Program Beasiswa Bidikmisi, 2010). Sebagai suatu kebijakan publik, Program Beasiswa Bidikmisi ini memiliki dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan beasiswa ini adalah: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016 : 3)

Agar program penyaluran beasiswa Bidikmisi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka diharapkan

para pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan sosialisasi, seleksi, dan penyaluran Beasiswa Bidikmisi mengacu pada satu pedoman yang dikeluarkan setiap tahun.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong pada penelitian evaluasi formatif. Penelitian evaluasi formatif menurut Sugiyono (2003: 10) digunakan untuk mendapatkan *feedback* dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk yang berupa barang atau jasa. Dalam penelitian penulis akan mengevaluasi implementasi Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado.

Dilihat dari tingkat eksplanasi maka penelitian ini dikelompokkan pada jenis penelitian deskriptif. Tingkat eksplanasi (*level of explanation*) menurut David Kline dalam Sugiyono (2003:11) adalah tingkat penjelasan. Lebih lanjut dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan untuk pendekatan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah cara kerja penelitian yang menekankan aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian (Ibrahim, 2015: 52). Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Fokus penelitian terarah pada proses implementasi program bantuan beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado

dengan mengumpulkan data tentang proses dan hasil melalui wawancara dengan para implementor. Para implementor tersebut adalah Direktur Politeknik Negeri Manado, Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kepala Bagian Akademik, Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dan para staf administrasi yang terkait dan beberapa mahasiswa penerima.

HASIL PENELITIAN

Kualitas implementasi kebijakan program bantuan beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado sejak awal sampai sekarang berlangsung dengan sangat baik. Hal itu dapat diukur melalui jumlah pelamar yang setiap tahun bertambah dan juga jumlah penerima yang selalu melebihi quota yang ditetapkan oleh Dikti.

Proses sosialisasi berjalan dengan baik karena didukung oleh kualitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain seperti sarana dan prasarana. Ketepatan waktu implementasi juga semakin lama semakin mengikuti waktu yang diharapkan baik oleh implementor maupun oleh masyarakat. Penghematan biaya dalam proses implementasi program bantuan beasiswa Bidikmisi dapat terjadi karena bentuk organisasi yang kecil. Disamping itu Dikti menyiapkan dana khusus untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kemandirian atau otonomi dalam bekerja nampak karena sebagai Perguruan Tinggi Politeknik juga memiliki otonomi untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari kebijakan pusat. Kerjasama dalam proses implementasi kebijakan program bantuan beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado nampak dengan keterlibatan unsur-unsur baik Pimpinan Politeknik dalam hal ini Direktur dan para Wakil Direktur, Ketua-ketua jurusan dan Kepala Bagian serta

Kepala UPT khususnya UPT Komunikasi dan Informasi.

SIMPULAN

Politeknik Negeri Manado sejak tahun 2010 sampai saat ini sudah mengimplementasikan program bantuan beasiswa Bidikmisi dengan baik. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh Politeknik Negeri Manado menerima mahasiswa dalam program Bidikmisi sebanyak 1.212 orang melebihi jumlah quota yang ditetapkan oleh Dikti. Ada sedikit kelemahan yaitu pada saat pendaftaran terjadi antrean pendaftar calon mahasiswa penerima Bidikmisi karena jalur pendaftaran menggunakan *website* belum berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu Politeknik Negeri Manado tetap mempertahankan proses implementasi yang sudah dilaksanakan sambil terus berbenah. Hal yang mendesak untuk dibenahi adalah proses pendaftaran terlebih khusus jalur pendaftaran yang menggunakan *website*.

DAFTAR PUSTAKA

- Desandi. 2015. Efektifitas Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4, tahun 2015
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. PT Alfabeta. Bandung.

- Novianto, Herta. 2014. Implementasi Kebijakan Administrasi Kemahasiswaan Universitas Bojonegoro di Bojonegoro. *Tesis*. Surabaya.
- Sairin, Weinata, 2014, *Himpunan Peraturan Pendidikan Tinggi*. Yrama Widya. Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Supriyatno, 2010. Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis. *Tesis*. Jakarta
- Tim Smart Genesis. 2016. *UUD 1945, Amandemen*. Genesis Learning. Yogyakarta.
- Visimedia. 2007. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, Visimedia
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Preses dan Studi Kasus Komparatif*. PT Buku Seru. Yogyakarta.